

Vocational Education Policy 

# WHITE PAPER

Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2019

ISSN : 2685-5739

**74<sup>TH</sup>**  
MENUJU  
INDONESIA  
UNGGUL



## ANALISIS KETERCUKUPAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BETTER POLICIES FOR BETTER VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING



**Direktorat Pembinaan SMK**  
Ditjen Dikdasmen  
Kemendikbud

**SMK**  
**BISA-HEBAT**  
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

**Susunan Dewan Redaksi :**

**VOCATIONAL EDUCATION POLICY, WHITE PAPER**

ISSN : 2685-5739

Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019

**Dewan Redaksi**

**Penanggung Jawab**

Direktur PSMK, Dr. M. Bakrun, M.M

**Ketua Redaksi**

Kasubdit Program dan Evaluasi, Arie Wibowo Khurniawan, S.Si, M.Ak.

**Redaksi Pelaksana**

Chrismi Widjajanti

Arfah Laidiah Razik

Farid Prasetyo Adi

Muhammad Abdul Majid

Ahmad Rofiuddin Syafaa

**Editor**

Gustriza Erda, S.Si, M.Si.

**Fotografi, Desain & Artistik**

Ari

Muhammad Raidinoor

Dzorif Fadlan

**Online Redaksi**

Muhammad Herdyka

**Mitra Redaksi (*Editorial Advisory Board*)**

1. Prof. Dr. Waras Kamdi, M.Si (Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang)

2. Prof. Dr. Suwarna, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta)

3. Hamid Muhammad, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta)

4. Dr. Ima Ismara, M.Pd., M.Kes. (Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta)

5. Irmawaty, SE., M.Si (Universitas Terbuka)

**Alamat Redaksi dan Distribusi :**

Redaksi VOCATIONAL EDUCATION POLICY, WHITE PAPER

Gedung E Lantai 12-13 Kompleks Kemendikbud

Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270

Telp. (021) – 5725477 (Hunting) 5725471-74 Fax. (021) – 5725049

Laman : psmk.kemdikbud.go.id, Surel : program.psmk@kemdikbud.go.id



# ANALISIS KETERCUKUPAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Arie Wibowo Khurniawan<sup>1</sup>, Muh. Abdul Majid<sup>2</sup>

**Abstrak.** Munculnya Inpres No. 9 tahun 2016 menandakan adanya sebuah kondisi darurat dalam pendidikan menengah kejuruan (SMK) di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) SMK tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lain. Sayangnya, munculnya Inpres tersebut tidak dibersamai dengan alokasi anggaran yang meningkat. Tahun 2017 justru terjadi penurunan 2,6T dan meningkat 1T ditahun 2018 serta menurun menjadi 4,3T tahun 2019. Belum lagi jika diproporsikan dalam struktur anggaran Pembinaan SMK dimana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) mencapai 50% dari total alokasi. Hal tersebut dinilai belum mampu mengakomodir kebutuhan pembiayaan pendidikan SMK ditengah tuntutan untuk menyelesaikan permasalahan di dalamnya. Kebijakan Dana Transfer Khusus pun dirasa belum mampu menjawab tantangan tersebut. Alokasi DAK Non Fisik (BOS) yang pada tahun 2019 meningkat 200.000 menjadi Rp. 1.600.000,- per siswa pun masih dinilai kurang untuk membantu operasionalisasi sekolah. Terlebih masih banyak sekolah yang dalam operasionalisasinya masih tergantung pada dana BOS sebagai satu-satunya sumber pembiayaan sekolah. Belum lagi politik 'sekolah gratis' di berbagai daerah yang menutup kemungkinan sumbangan dari masyarakat untuk pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan alternatif untuk keluar dari permasalahan pembiayaan pendidikan tersebut. Melalui kajian inilah ikhtiar untuk memunculkan kebijakan alternatif itu diinisiasi. Rekomendasi terpenting seperti perlu diinisiasi kebijakan pengelolaan keuangan sekolah secara mandiri dengan pola BLUD dan secara bersamaan dimasifikannya teaching factory sebagai Income Generating Unit di sekolah. Kajian ini menggunakan metode analisa kualitatif-deskriptif dengan melakukan interpretasi terhadap data yang sudah ada untuk kemudian dilakukan analisa kualitatif dengan menghubungkan antar setiap permasalahan agar bisa disajikan data dan rekomendasi yang bermakna.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Alternatif, BLUD, Income Generating Unit

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

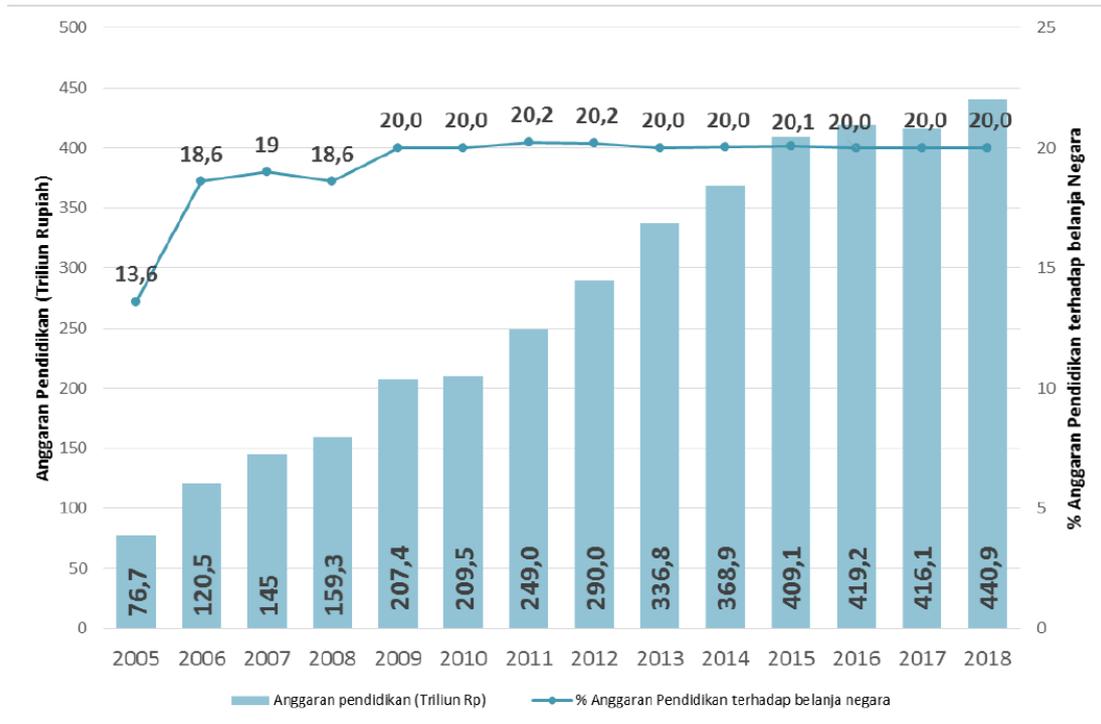
Dalam Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan oleh karenanya Negara wajib menyelenggarakan pendidikan yang berkeadilan. Hal tersebut senada dengan amanat konstitusi dimana negara berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konstitusi dan UU tersebut juga mengamanatkan negara mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Alokasi anggaran dinilai sebagai bentuk keberpihakan konstitusional untuk mewujudkan cita-cita

konstitusi. Namun, dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut dibutuh 6 tahun untuk pelaksanaannya.

Kendati terhitung dari tahun 2009 alokasi anggaran untuk pendidikan sudah mencapai 20% dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya capaian Standar Nasional Pendidikan masih dinilai jauh panggang dari api. Anggaran pendidikan masih dinilai belum teroptimalkan dengan baik sehingga capaian mutu pendidikan masih dinilai kurang. Lantas yang menjadi pertanyaan apakah yang bermasalah dalam sistem pendidikan kita. Apakah alokasi 20% dari APBN masih dinilai kurang ataukah struktur alokasi anggaran pendidikan yang bermasalah sehingga cita-cita pendidikan masih sulit untuk dicapai.

<sup>1</sup> Kepala Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Dikdasmen, Kemdikbud

<sup>2</sup> Staf Subdit Program dan Evaluasi

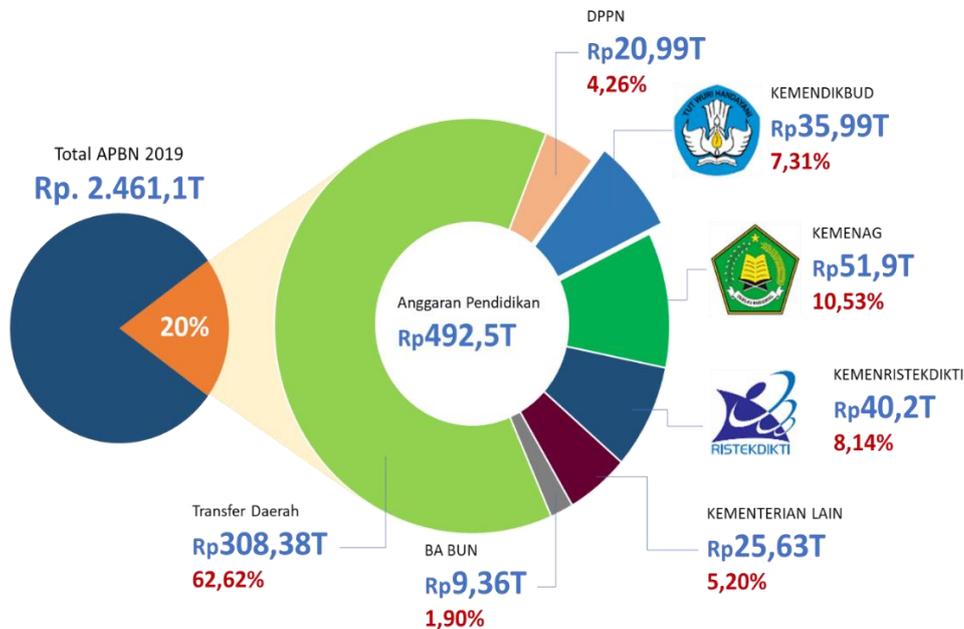


Sumber: Bappenas 2018

Gambar 1. Trend Anggaran Pendidikan

Terlebih lagi terjadi salah kaprah tentang anggaran pendidikan. Telah terjadi simbolisasi bahwa yang mengelola dana pendidikan adalah hanya satu kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal dalam

struktur anggaran, pengguna anggaran pendidikan terdiri dari beberapa Kementerian. Artinya bahwa tidak serta merta permasalahan pendidikan dibebankan sepenuhnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Sumber: Kemendikbud 2019

Gambar 2. Postur Anggaran Pendidikan tahun 2019

Sentralisasi pengelolaan pendidikan tidak hanya tupoksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, melainkan juga dari Kementerian terkait seperti uraian dalam gambar 2 di atas. Alokasi untuk Kemendikbud hanya 7,31% dimana anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai berbagai macam kegiatan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PKPLK, Kursus, GTK, Kebudayaan dan sebagainya. Sudah dapat dipastikan bahwa anggaran tersebut tidak cukup.

Kebijakan Dana Transfer Khusus pun dirasa belum mampu menjawab tantangan tersebut. Alokasi DAK Non Fisik (BOS) SMK yang pada tahun 2019 meningkat 200.000 menjadi Rp. 1.600.000,- per siswa pun masih dinilai kurang untuk membantu operasionalisasi sekolah. Terlebih masih banyak sekolah yang dalam operasionalisasinya masih tergantung pada dana BOS sebagai satu-satunya sumber pembiayaan sekolah. Belum lagi politik 'sekolah gratis' di daerah yang menutup kemungkinan sumbangan dari masyarakat untuk pendidikan. Padahal dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pembiayaan pendidikan diperbolehkan masyarakat memberikan iuran untuk keberlanjutan operasionalisasi sekolah. Karena politik 'sekolah gratis' di berbagai daerah inilah mau tidak mau sumber pembiayaan pendidikan di daerah hanya mengandalkan Dana BOS dari APBN tersebut.

Permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan kejuruan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk ditemukan solusi kebijakan alternatif. Jika sekolah kekurangan pembiayaan operasional maka akan berpengaruh pada efektifitas pembelajaran di sekolah dan secara otomatis akan berimplikasi terhadap mutu dan kualitas pendidikan.

## Tujuan

Tujuan dari kajian kebijakan ini adalah untuk menguraikan permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terkait dengan pembiayaan pendidikan dan menemukan titik kulminasi berupa solusi untuk mengatasi hal tersebut.

## *Manfaat*

Manfaat dari kajian ilmiah kebijakan ini adalah ditemukannya akar permasalahan pembiayaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan untuk kemudian dilakukan perencanaan pembuatan kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## METODE

### *Data*

Data yang digunakan pada kajian ini adalah data anggaran berbagai tahun anggaran utamanya tahun anggaran 2018 dan 2019, Data Neraca Pendidikan Daerah tahun 2018 dan data survey biaya peralatan pendidikan SMK tahun 2019.

### *Metode Analisis*

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan statistika deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena merupakan salah satu jenis dari analisis statistika yang sederhana dengan menampilkan data sehingga mempunyai informasi yang bermakna (Hasan, 2001). Dalam Analisis ini digunakan untuk melihat permasalahan pembiayaan pendidikan dengan menjelaskan variabel pembiayaan pendidikan pada level pusat sampai dengan daerah. Kualitatif Deskriptif sebagai core analisa dipilih untuk menjelaskan beyond the fact yang tidak bisa dijangkau menggunakan data kuantitatif (Sugiyono, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Struktur Biaya Pendidikan SMK di Indonesia*

Proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi peserta didik, membutuhkan berbagai sumber daya untuk penyelenggaraannya seperti pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta peran serta masyarakat. Faktor lain yang menjadi penentu keberhasilan pendidikan adalah dana pendidikan. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

Pendanaan pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pemerintah telah memberikan perhatian yang besar dalam hal pendanaan Pendidikan, hal ini dibuktikan dengan alokasi dana pendidikan yang cukup besar sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa, "Dana pendidikan termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah." Dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan, tidak semua pendanaan di satuan pendidikan dapat terselesaikan dengan alokasi dana APBN dan APBD. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah, membutuhkan sumber dana

pendidikan yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan biaya pendidikan (Imam et.al; 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan secara spesifik mengklasifikasikan pendanaan untuk biaya satuan pendidikan berdasarkan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah dan Masyarakat. Pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah. Untuk pendanaan tambahannya dapat bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan atau sumber lain yang sah. Pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara yang dalam hal ini adalah yayasan pendidikan yang bersangkutan, dan untuk pendanaan tambahannya dapat bersumber dari yayasan, orang tua/wali peserta didik, masyarakat di luar orang tua/wali, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan atau sumber lain yang sah. Selanjutnya PP Nomor 48 Tahun 2008 pada pasal 3 ayat 2 mengklasifikasikan biaya satuan pendidikan menjadi biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Selanjutnya biaya investasi terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan, dan biaya operasi terdiri atas biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Gambar berikut adalah gambar skema biaya satuan Pendidikan (Imam et.al; 2018).



Sumber: Naskah Kebijakan Dit.PSMK (2018)

Gambar 3. Skema Biaya Satuan Pendidikan

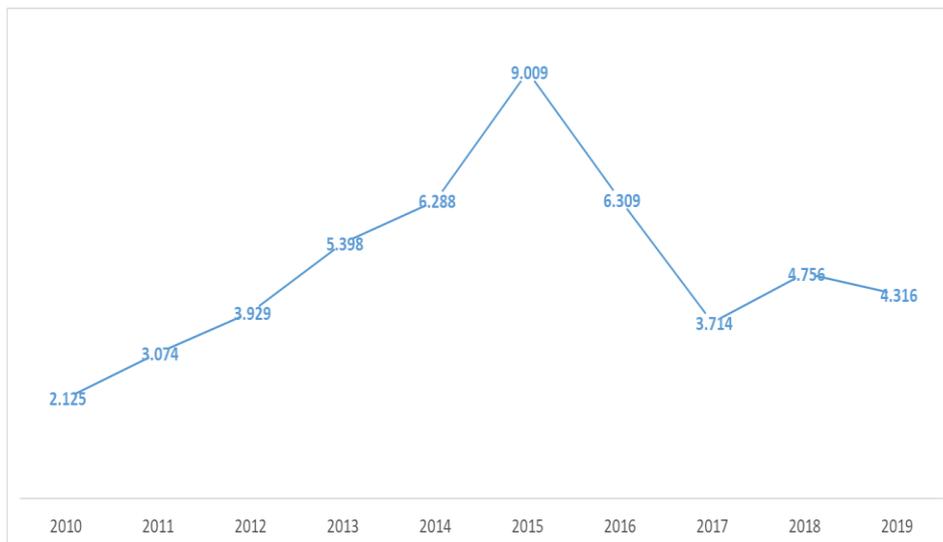
Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan menyatakan bahwa Komponen Biaya Operasi personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Sedangkan Komponen Biaya Operasi nonpersonalia meliputi biaya pengadaan alat tulis, bahan dan alat habis pakai kegiatan belajar mengajar teori dan praktikum, daya, air, jasa telekomunikasi, konsumsi, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana, biaya lembur, biaya transportasi, pajak, biaya asuransi, biaya kegiatan pembinaan peserta didik/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi/sertifikasi kompetensi, biaya praktik kerja/magang industri, biaya bengkel kerja berbasis industri, serta biaya perencanaan dan pelaporan.

Pemenuhan Standar Biaya Operasi nonpersonalia menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### ***Keterbatasan Anggaran Pendidikan SMK***

Harus diakui bahwa politik anggaran pendidikan nasional belum bisa merepresentasikan keberpihakan untuk mendukung agresifitas program untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas untuk mengurus pendidikan dasar dan menengah yang jumlah sekolahnya mencapai 250.000 lebih alokasi anggaran pendidikannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kementerian Agama maupun Ristek Dikti. Alokasi anggaran tersebut jelas merepresentasikan keberpihakan politik anggaran sangat minim. Kondisi tersebut berlangsung sejak Undang-Undang mengamanatkan alokasi anggaran untuk pendidikan sebanyak 20% dari total APBN.

Jika diderivatifkan sampai pada unit kerja setingkat eselon II yaitu Direktorat Pembinaan SMK sebagai satuan kerja yang bertugas untuk menjalankan Inpres nomor 9 tahun 2016 juga mendapatkan implikasi anggaran yang telah dialokasikan antar kementerian seperti dijelaskan pada gambar 2 di atas.

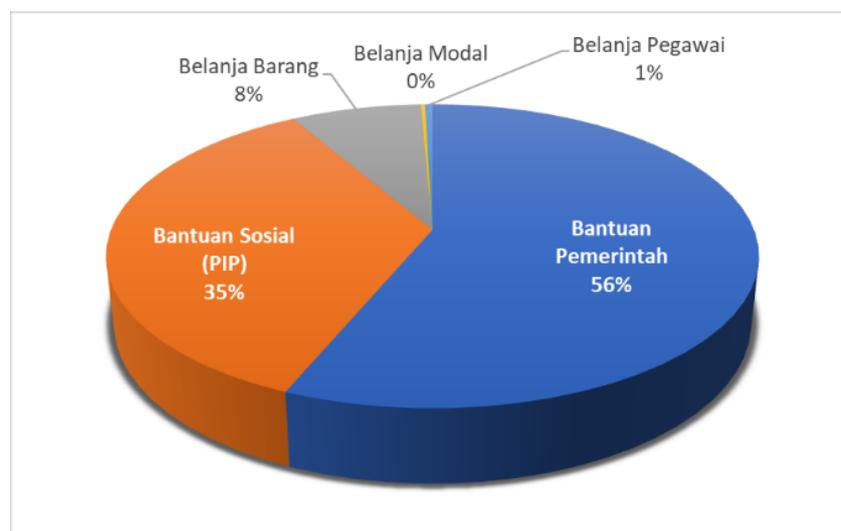


Sumber: Dit.PSMK (2019)

**Gambar 4.** Perkembangan Anggaran Direktorat Pembinaan SMK tahun 2010-2019

Dilihat dari trend alokasi anggaran untuk pembinaan SMK dari tahun ke tahun baik ada atau tidaknya inpres cenderung tidak menunjukkan perubahan berarti. Kenaikan pagu anggaran pada tahun 2015 bukanlah menandakan kenaikan secara substansial dalam struktur anggran direktorat melainkan dikarenakan naiknya jumlah penerima PIP

(Program Indonesia Pintar). Jika dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan untuk mengelola lebih dari 14.157 sekolah, jelas anggaran tersebut jauh panggang dari api. Tidak bisa secara optimal bahkan tidak akan pernah mampu memenuhi kebutuhan sekolah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.



Sumber: DIPA Dit.PSMK 2019

**Gambar 5.** Struktur Anggaran Dit. PSMK 2019

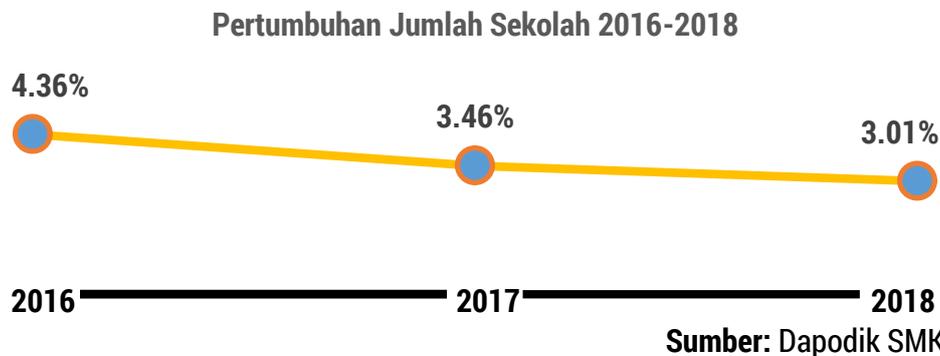
Dalam struktur anggaran tahun 2019 pun tidak terjadi perubahan yang signifikan apalagi fundamental. Strukturnya masih di dominasi oleh Bansos Program Indonesia Pintar (PIP)

sebesar 1,5 Trilyun dan Bantuan Pemerintah yang isinya merupakan bantuan untuk pengadaan sarana dan prasarana SMK sebesar 2,4 Trilyun. Banper ini tidak mampu menjangkau

100% kebutuhan pendidikan SMK di setiap sekolah.

Jika melihat trend perkembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang baru yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya, maka diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 3,4%.

Pertumbuhan jumlah SMK tidak diiringi dengan pertumbuhan alokasi anggaran untuk SMK yang proporsional. Relasi yang asimetrikal jelas berimplikasi terhadap pembinaan SMK di Indonesia. Perlu adanya alternatif pembiayaan lain untuk mendorong optimalisasi mutu kualitas pendidikan kejuruan di Indonesia selain menghentikan pertumbuhan SMK baru.



**Gambar 6.** Pertumbuhan Jumlah Sekolah 2016-2018

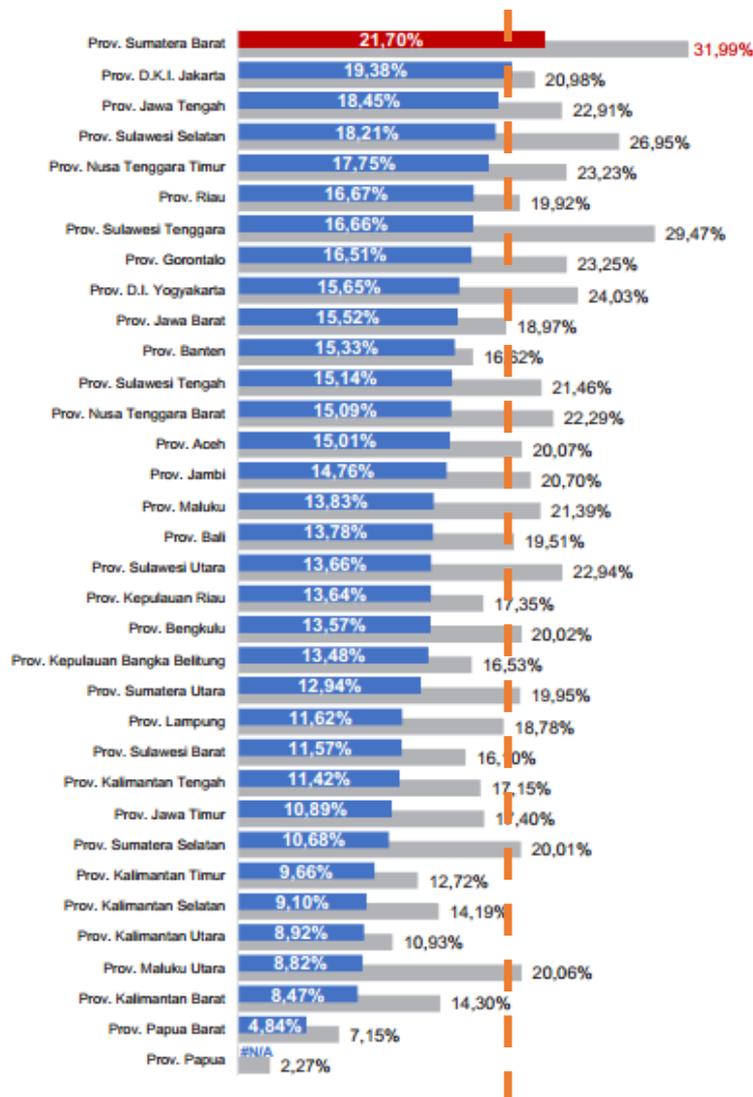
Mengandaikan pembinaan pendidikan yang hanya bersumber pada APBN ini tidak akan mampu untuk mengurus 14.157 sekolah dengan kompleksitas dan kebutuhan yang tinggi. Perlu adanya dorongan untuk berbagai pihak terlibat dalam pembiayaan pendidikan SMK.

***Terbatasnya Alokasi Anggaran Pendidikan dan Politik ‘Sekolah Gratis’ di Daerah***

Pendanaan pendidikan dari sumber APBN dan APBD mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Besaran dana pendidikan yang memadai menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Pembagian tanggung jawab dan kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota akan dapat mengoptimalkan dan mengefisienkan alokasi dana pendidikan. Penggunaan dana pendidikan yang tepat memungkinkan pengalokasian dana yang efisien dan adil.

Pada Tahun 2018, pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk anggaran transfer pendidikan SMK sebanyak hampir 1.5 Triliun rupiah. Anggaran terbesar diberikan kepada tiga provinsi di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tiap provinsi tersebut memperoleh sebesar 298,91 milyar rupiah, 253, 82 milyar rupiah dan 241.36 milyar rupiah. Anggaran pendidikan yang tinggi di ketiga provinsi tersebut sesuaikan dengan jumlah sekolah yang juga tinggi, dimana masing-masing provinsi tersebut memiliki lebih dari 1.900 SMK.

Anggaran pendidikan dari APBD tertinggi dipegang oleh DKI Jakarta, yaitu mencapai 71.164 Milyar rupiah, disusul dengan Jawa barat sebesar 33.96 Milyar Rupiah dan Jawa Timur sebesar 30.76 milyar rupiah. Sementara anggaran Pendidikan yang diambil dari APBD di Provinsi lainnya hanya sekitar 1 hingga 25 Milyar rupiah, dengan anggaran APBD terendah berada di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat yang hanya mendapat anggaran APBD kurang dari 2 Milyar rupiah.



**Keterangan:**



Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan di Luar Transfer Daerah (APBD Murni)

Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan dengan Transfer Daerah (Minus BOS)

**Sumber:** <https://npd.kemdikbud.go.id>

**Gambar 7.** Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan tiap provinsi

Berdasarkan Gambar 7, terlihat bahwa secara umum anggaran Pendidikan dari APBD tiap provinsi masih belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 49 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, hanya Sumatera Barat, sebagai satu-satunya provinsi yang telah memberikan anggaran pendidikan lebih dari 20%. Sementara itu, DKI Jakarta, sebagai pemberi APBD tertinggi untuk dana pendidikan, hanya memberikan

19.38 % dana APBD untuk pendidikan. Ironisnya, bahkan masih terdapat provinsi yang mengalokasikan kurang dari 10% APBD-nya untuk pendidikan, seperti pada Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Papua Barat dan Papua.

Banyaknya pemerintah propinsi yang belum mengalokasikan 20% APBD-nya untuk pendidikan mengindikasikan bahwa pemerintah

propinsi masih belum serius dan belum mengutamakan pendidikan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa tingkat translation ability pemerintah propinsi terhadap pendidikan masih sangat kurang. Padahal pendidikan merupakan hal penting yang harus diperhatikan pemerintah karena pendidikan yang baik menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan sumber daya manusia yang handal serta dapat meningkatkan perekonomian.

Diharapkan kedepannya pemerintah propinsi mampu memberikan ide-ide baru dan inovatif untuk meningkatkan tata kelola anggaran pendidikan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan UU no 23 tahun 2014, dimana pengelolaan SMK menjadi tanggungjawab pemerintah propinsi. Pemerintah Propinsi juga hendaknya melakukan inovasi melalui beberapa terobosan, misalnya mempertimbangkan penerbitan obligasi daerah, dan membuka kerjasama dengan pihak swasta demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, agar target dari pembangunan pendidikan oleh pemerintah dapat tercapai dan tepat sasaran, sangat dibutuhkan peran dari DPRD untuk mengevaluasi pengalokasian dana 20% dari APBD untuk pendidikan.

Hal lain yang terjadi di daerah adalah adanya politik 'Sekolah Gratis'. Kebijakan tersebut sangat asimetrikal karena membuat sekolah

tidak bisa memungut iuran masyarakat untuk membantu pembiayaan pendidikan. Tidak ada yang salah dengan kebijakan 'Sekolah Gratis' jika pemerintah daerah siap menggantikan peran masyarakat dalam membiayai sekolah. Yang tadinya dibiayai oleh masyarakat kemudian diambil alih oleh pemerintah daerah. Namun pada kenyataannya pemerintah propinsi yang mencanangkan 'Sekolah Gratis' tidak menyediakan alokasi anggaran pengganti yang sedianya diberikan oleh masyarakat. Pemerintah propinsi mengandalkan sepenuhnya dengan pembiayaan tunggal dari Dana BOS APBN. Ironisnya penyaluran BOS SMK ini juga sering terlambat karena birokrasi pemerintah propinsi yang sangat panjang.

**Perhitungan Pembiayaan Operasional Untuk SMK**

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh UNS (Universitas Sebelas Maret) pada tahun 2018. Perhitungan pembiayaan operasional pendidikan menggunakan pendekatan perhitungan setiap komponen standar nasional pendidikan yang kemudian di agregasi hingga menjadi harga satuan per orang per bulan. Diketahui bahwa perhitungan pembiayaan untuk operasional SMK yang dihitung oleh UNS sejumlah 300 siswa pada bidang keahlian bisnis manajemen. Adapun gambar di bawah ini adalah hasil dari perhitungan tersebut.

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN BERDASARKAN SNP	BIAYA YANG DIBUTUHKAN (dalam Rupiah)
1	Standar Isi	40,059,680
2	Standar Proses	694,787,645
3	Standar Penilaian	170,923,000
4	Standar Kompetensi Lulusan	75,197,500
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	92,250,000
6	Standar Sarpras	338,500,000
7	Standar Pengelolaan	96,775,500
8	Standar Pembiayaan	169,083,300
TOTAL BIAYA		1,677,576,625
<b>TOTAL BIAYA PEMBULATAN</b>		<b>1,677,577,000</b>
<b>BIAYA PER SISWA/ TAHUN</b>		<b>5,667,000</b>
<b>BIAYA PER SISWA/ BULAN</b>		<b>472,250</b>

Sumber: Imam et.al (2018)

**Gambar 8.** Perhitungan Satuan Standar Pembiayaan SMK Berdasarkan SNP

Untuk mendapatkan nilai yang representatif dan valid bagi semua bidang keahlian, maka data tersebut di atas yaitu (satu biaya per siswa per bulan) dijadikan sebagai faktor pengali. Faktor ini kemudian dipadukan dengan perhitungan rasional-kalkulatif terhadap indeks kemahalan harga peralatan praktik dari 9 bidang keahlian, 49 program keahlian dan 146 kompetensi keahlian sebagaimana terlampir dalam lampiran 1. Adapun dasar dari penggunaan pendekatan indeks peralatan praktik sebagai faktor pengali untuk mendapatkan nilai dari faktor pembobot dalam diferensiasi biaya adalah peralatan praktik merupakan komponen pembiayaan yang

memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan komponen pembiayaan lainnya sehingga dengan melakukan perhitungan terhadap nilai tertinggi ini akan didapat nilai agregat yang representatif untuk perhitungan setiap komponen pembiayaan operasional.

Indeks kemahalan peralatan praktek SMK diperoleh melalui survey harga pasar peralatan praktek komplet untuk satu ruang praktek yang dilakukan oleh tim Direktorat Pembinaan SMK pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019 dengan hasil biaya rata-rata per bidang keahlian adalah sebagai berikut:

NO	BIDANG KEAHLIAN	SATUAN BIAYA PEMENUHAN PERALATAN PRAKTEK LENGKAP (dalam Rupiah)
1	Teknologi dan Rekayasa	5,715,517,000
2	Energi dan Pertambangan	5,083,000,000
3	Teknologi informasi dan Komunikasi	1,983,000,000
4	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	1,500,000,000
5	Agribisnis dan Agroteknologi	2,840,000,000
6	Kemaritiman	3,790,000,000
7	Bisnis Manajemen	857,000,000
8	Pariwisata	1,588,000,000
9	Seni dan Industri Kreatif	1,978,000,000

**Sumber:** Survey Pasar Dit. PSMK

**Gambar 9.** Satuan Biaya Peralatan Praktek per RPS dari Rata-Rata Biaya Peralatan Praktek Program Keahlian

Adapun perhitungan selanjutnya setelah didapat faktor pembobot adalah dengan melakukan kalkulasi integral antara faktor pembobot dan standar biaya satuan BOS tertinggi di Indonesia per siswa per bulan. Faktor pembobot juga berfungsi sebagai faktor deferensiasi dimana menjadi nilai pembeda antar setiap komponen pembiayaan yang dalam konteks perhitungan ini menjadi faktor penambah pembeda antar setiap bidang keahlian. Faktor inilah yang membedakan nilai tambah yang berbeda disetiap bidang keahlian. Perbedaan ini sangat

wajar karena setiap bidang keahlian memiliki karakteristik kebutuhan operasional yang berbeda.

Sedangkan standar satuan biaya dijadikan sebagai faktor independen yang didapat dari satu biaya tertinggi dari alokasi dana BOS di Indonesia. Dari kedua faktor inilah didapat standar biaya yang ideal sehingga mampu merepresentasikan satuan biaya operasional untuk setiap bidang keahlian bahkan sampai

dengan program keahlian dan kompetensi keahlian.

Adapun rincian perhitungan detail ada di gambar 10 di bawah ini :

Bidang Keahlian	Nilai Rata-Rata (1)	Indeks Kemahalan Peralatan Praktek	Faktor Pembobot (Rp)	Standar BOS Tertinggi per Bulan (Rp)	Biaya Operasional per Bulan (Rp)	Biaya Operasional per Tahun (Rp)
(1)	(2)	(3) = (2) : Total	(4) = (3) x 472.250	(5)	(6) = (5) x (4)	(7) = (6) x 12
Teknologi dan Rekayasa	5.715.000.000	0,226	106.000	600.000	706.000	8.472.000
Energi dan Pertambangan	5.083.000.000	0,201	94.000	600.000	694.000	8.328.000
Teknologi informasi dan Komunikasi	1.983.000.000	0,078	36.000	600.000	636.000	7.632.000
Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	1.500.000.000	0,059	27.000	600.000	627.000	7.524.000
Agribisnis dan Agroteknologi	2.840.000.000	0,112	52.000	600.000	652.000	7.824.000
Kemaritiman	3.790.000.000	0,150	70.000	600.000	670.000	8.040.000
Bisnis Manajemen	857.000.000	0,034	15.000	400.000	415.000	4.980.000
Pariwisata	1.588.000.000	0,063	30.000	500.000	530.000	6.360.000
Seni dan Industri Kreatif	1.978.000.000	0,078	37.000	500.000	537.000	6.444.000
<b>Total</b>	<b>25.334.000.000</b>	<b>1</b>				

Sumber: data diolah

**Gambar 10.** Satuan Biaya Operasional SMK berdasarkan Bidang Keahlian per Siswa Per Bulan dan Per Tahun

Perhitungan tersebut diatas merupakan nilai optimal total kebutuhan operasional SMK setiap bidang keahliannya sehingga jika dibandingkan dengan biaya satuan yang diberikan oleh pemerintah pada tahun ini maka sudah dapat dipastikan masih sangat jauh dari angka kecukupan. Oleh karena itu kajian ini merupakan ikhtiar untuk mendapatkan nilai optimal biaya satuan pembiayaan operasional SMK sehingga SMK dapat mencapai target yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 untuk menghasilkan lulusannya siap bekerja pada suatu bidang tertentu. Sekaligus menjadi dasar perhitungan untuk rekomendasi kebijakan perubahan satuan biaya untuk bantuan pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika SMK kita ingin maju maka tata kelola

dan intervensi negara untuk memajukan juga sangat penting. Oleh karenanya sudah seharusnya ada revisi atau penambahan jumlah biaya satuan operasional untuk SMK ini.

Jika disimpulkan dengan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOS) dengan total kebutuhan ideal SMK setiap bidang keahliannya terdapat selisih yang sangat besar. Hal tersebut jelas akan berimplikasi pada penyediaan sarana prasarana dan operasionalisasi sekolah yang tidak akan berjalan secara maksimal. Ditambah lagi pertumbuhan jumlah SMK tidak dibarengi dengan pertumbuhan alokasi anggaran untuk Direktorat Pembinaan SMK. Berikut ini hasil selisih antara pembiayaan yang sudah ada dengan pembiayaan ideal yang harusnya dipenuhi untuk pembinaan SMK:

Bidang Keahlian	Biaya Operasional per Tahun (Rp) (OPTIMAL)	BOS SMK Tahun 2019 (Rp)	Selisih (Rp)	Analisis Ketercukupan Biaya
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)
Teknologi dan Rekayasa	8,472,000	1,600,000	6,872,000	Kurang
Energi dan Pertambangan	8,328,000	1,600,000	6,728,000	Kurang
Teknologi informasi dan Komunikasi	7,632,000	1,600,000	6,032,000	Kurang
Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	7,524,000	1,600,000	5,924,000	Kurang
Agribisnis dan Agroteknologi	7,824,000	1,600,000	6,224,000	Kurang
Kemaritiman	8,040,000	1,600,000	6,440,000	Kurang
Bisnis Manajemen	4,980,000	1,600,000	3,380,000	Kurang
Pariwisata	6,360,000	1,600,000	4,760,000	Kurang
Seni dan Industri Kreatif	6,444,000	1,600,000	4,844,000	Kurang

Sumber: data diolah

Gambar 11. Analisis Ketercukupan Biaya Operasional SMK

Kondisi saat ini hampir merata di seluruh SMK yang ada praktis hanya mengandalkan dana BOS sebagai satu-satunya sumber pembiayaan operasional. Kondisi ini sangat tidak akan cukup untuk memenuhi standar pembiayaan operasional yang meningkat dengan kondisi inflasi yang semakin hari semakin tinggi. Oleh karena itu perlu adanya terobosan baru baik secara kebijakan maupun alternatif lain untuk menambah kekurangan pembiayaan tersebut. Pemerintah daerah harus mampu memberikan stimulus anggaran agar pembiayaan pendidikan SMK agar sekolah dapat berjalan secara maksimal sehingga bisa mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dari pembahasan detail di atas diketahui bahwa permasalahan pembiayaan pendidikan untuk satuan pendidikan SMK adalah kurangnya komitmen Pemerintah dan Pemerintah Propinsi yang terepresentasikan dari politik anggaran yang belum memihak untuk pembangunan pendidikan SMK di Indonesia. Terbitnya Inpres No.9 tahun 2016 tidak secara serta merta diiringi penambahan anggaran yang berlebih. Namun fakta menyatakan bahwa yang terjadi justru pada tahun 2017 terjadi pengurangan anggaran untuk Pembinaan SMK. Kebijakan Dana Transfer Khusus pun dirasa belum mampu menjawab

tantangan tersebut. Terlebih masih banyak sekolah yang dalam operasionalisasinya masih tergantung pada dana BOS sebagai satu-satunya sumber pembiayaan sekolah dikarenakan politik 'sekolah gratis' kepala daerah.

Oleh karena itu perlu adanya **Exit Strategy** untuk mengatasi permasalahan pembiayaan pendidikan SMK saat ini mengingat bahwa **anggaran untuk pendidikan SMK akan selalu tidak tercukupi karena kue anggaran yang dimiliki pemerintah dan pemerintah daerah terbatas yang tidak hanya difokuskan untuk pendidikan SMK saja. Jadi prediksi dinyatakan bahwa kondisi tersebut akan terus berlangsung 10 tahun atau bahkan 20 tahun lagi ke depan.**

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya keberpihakan terhadap terhadap pembangunan SMK melalui politik anggaran yang berkeadilan. Memberikan pengarahannya kepada kepala daerah agar politik sekolah gratis tidak diterapkan karena dapat mendistraksi pembiayaan pendidikan di sekolah
2. SMK harus diberikan advokasi peraturan khusus untuk menjalankan 2 (dua) otonomi yaitu (1) **Otonomi dalam pengelolaan akademis** dan; (2) **Otonomi dalam**

pengelolaan "**Wealth**" yang mencakup keuangan, sumber daya, dan asset. Kedua unsur utama ini seperti halnya dua sisi mata uang, kedua-duanya harus eksis dan saling mendukung untuk mampu menghasilkan produk pendidikan SMK yang bermutu, baik berupa lulusan, hasil produksi, dan inovasi yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya.

3. SMK diberikan kewenangan untuk menerapkan **Wealth Management**. Kondisi ini pada hakikatnya dibutuhkan oleh semua individu ataupun entitas yang mempunyai kekayaan dan menginginkan pemeliharaan,

penjagaan, dan pengembangan nilai kekayaannya untuk memenuhi keperluannya secara mandiri tanpa harus bergantung pada Pemerintah.

4. Bagi SMK yang bertatus Negeri maka harus melakukan transformasi organisasi menjadi **BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)** sehingga SMK menjadi sebuah entitas yang otonom untuk menerapkan **Wealth Management** baik yang bersifat Investasi maupun Usaha Unit Produksi/Teaching factory.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifi M. 2008. Anggaran Pendidikan dan Mutu Pendidikan: Respon Kebijakan Anggaran Pendidikan 20% dari APBN Bagi Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 5:1
- Bappenas. 2018. Penataan Anggaran Pendidikan dalam Perencanaan dan Penganggaran. Working Paper Bappenas
- Bowo et.al. 2018. Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta: Dit. PSMK Kemdikbud
- Dokumen Perencanaan Anggaran Direktorat Pembinaan SMK tahun Anggaran 2019
- Hasan I. 2001. Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif). Jakarta: PT Bumi Aksara
- Imam, Sudjadi et.al. 2018. Pembiayaan Operasional Non Personalia untuk Optimalisasi Mutu Lulusan SMK. Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Jakarta: Pustaka Alfabeta

**LAMPIRAN 1**  
**BIAYA PEMENUHAN PERALATAN PRAKTEK UTAMA LENGKAP**  
**PER RUANG PRAKTEK SISWA**  
**(dalam rupiah)**

NO	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	BIAYA PERALATAN PRAKTEK UTAMA PER RUANG PRAKTEK	
01	Teknologi dan Rekayasa	Teknologi Konstruksi dan Properti	Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan	4.300.000.000	
			Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan	2.500.000.000	
			Bisnis Konstruksi dan Properti	6.500.000.000	
			Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	5.400.000.000	
		Teknik Geomatika dan Geospasial	Teknik Geomatika	4.400.000.000	
			Informasi Geospasial	4.200.000.000	
		Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	4.200.000.000	
			Teknik Jaringan Tenaga Listrik	5.700.000.000	
			Teknik Instalasi Tenaga Listrik	13.000.000.000	
			Teknik Otomasi Industri	13.900.000.000	
			Teknik Pendinginan dan Tata Udara	10.000.000.000	
			Teknik Tenaga Listrik	7.000.000.000	
			Teknik Mesin	Teknik Pemesinan	9.000.000.000
				Teknik Pengelasan	4.300.000.000
		Teknik Pengecoran Logam		4.500.000.000	
		Teknik Mekanik Industri		4.500.000.000	
		Teknik Perancangan dan Gambar Mesin		3.200.000.000	
		Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur		2.700.000.000	
		Teknologi Pesawat Udara	Airframe Power Plant	5.000.000.000	
			Aircraft Machining	4.500.000.000	
			Aircraft Sheet Metal Forming	3.000.000.000	
			Airframe Mechanics	6.500.000.000	
			Aircraft Electricity	7.000.000.000	
			Aviation Electronis	10.000.000.000	
			Electrical Avionics	7.000.000.000	
		Teknik Grafika	Desain Grafika	4.300.000.000	
			Produksi Grafika	5.000.000.000	
		Teknik Instrumentasi Industri	Teknik Instrumentasi Logam	5.900.000.000	
			Instrumentasi dan Otomatisasi Proses	9.500.000.000	
		Teknik Industri	Teknik Pengendalian Produksi	1.800.000.000	
			Teknik Logistik	1.400.000.000	
		Teknologi Tekstil	Teknik Pemintalan Serat Buatan	2.000.000.000	
			Teknik Pembuatan Benang	6.000.000.000	
			Teknik Pembuatan Kain	6.000.000.000	
			Teknik Penyempurnaan Tekstil	6.000.000.000	
		Teknik Kimia	Analisis Pengujian Laboratorium	2.600.000.000	
			Kimia Industri	4.000.000.000	
			Kimia Analisis 4 thn	4.600.000.000	
			Kimia Tekstil	6.000.000.000	

NO	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	BIAYA PERALATAN PRAKTEK UTAMA PER RUANG PRAKTEK
		Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	9.000.000.000
			Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	3.000.000.000
			Teknik Alat Berat	5.000.000.000
			Teknik Bodi Otomotif	2.700.000.000
			Teknik Ototronik	10.000.000.000
			Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif	7.500.000.000
			Otomotif Daya dan Konversi Energi	6.000.000.000
		Teknik Perkapalan	Konstruksi Kapal Baja	2.400.000.000
			Konstruksi Kapal Kayu dan Fiberglass	900.000.000
			Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	3.500.000.000
			Teknik Pengelasan Kapal	3.000.000.000
			Teknik Kelistrikan Kapal	8.300.000.000
			Desain dan Rancang Bangun Kapal	3.200.000.000
			Interior Kapal	2.300.000.000
		Teknik Elektronika	Teknik Audio Video	6.000.000.000
			Teknik Elektronika Industri	11.800.000.000
			Teknik Mekatronika	18.500.000.000
Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi	5.500.000.000			
Instrumentasi Medik	5.500.000.000			
02 Energi dan Pertambangan	Teknik Perminyakan	Teknik Produksi Minyak dan Gas	6.000.000.000	
		Teknik Pemboran Minyak dan Gas	10.000.000.000	
		Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia	5.000.000.000	
	Geologi Pertambangan	Geologi Pertambangan	3.000.000.000	
	Teknik Energi Terbarukan	Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin (ESHA)	5.000.000.000	
		Teknik Energi Biomassa	1.500.000.000	
03 Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak	1.500.000.000	
		Teknik Komputer dan Jaringan	1.800.000.000	
		Multimedia	1.900.000.000	
		Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi	1.400.000.000	
	Teknik Telekomunikasi	Teknik Transmisi Telekomunikasi	2.000.000.000	
		Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi	3.300.000.000	
04 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	Keperawatan	Asisten Keperawatan	300.000.000	
	Kesehatan Gigi	Dental Asisten	1.000.000.000	
	Teknologi Laboratorium Medik	Teknologi Laboratorium Medik	2.900.000.000	
	Farmasi	Farmasi Industri	2.000.000.000	
		Farmasi Klinis dan Komunitas	2.000.000.000	
	Pekerjaan Sosial	Social Care (Keperawatan Sosial)	1.200.000.000	
		Caregiver	1.100.000.000	
05 Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	5.000.000.000	
		Agribisnis Tanaman Perkebunan	4.400.000.000	
		Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman	4.000.000.000	
		Lanskap dan Pertamanan	1.000.000.000	
		Produksi dan Pengelolaan Perkebunan	3.700.000.000	

NO	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	BIAYA PERALATAN PRAKTEK UTAMA PER RUANG PRAKTEK	
			Agribisnis Organik Ekologi	4.300.000.000	
			Agribisnis Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia	2.000.000.000
				Agribisnis Ternak Unggas	2.000.000.000
				Industri Peternakan	2.300.000.000
			Kesehatan Hewan	Keperawatan Hewan	1.300.000.000
				Kesehatan dan Reproduksi Hewan	1.300.000.000
			Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1.400.000.000
				Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	1.300.000.000
				Agroindustri	1.300.000.000
			Teknik Pertanian	Alat Mesin Pertanian	3.200.000.000
				Otomatisasi Pertanian	4.500.000.000
			Kehutanan	Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	2.900.000.000
				Konservasi Sumber Daya Hutan	2.100.000.000
				Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	3.800.000.000
Teknologi Produksi Hasil Hutan	5.000.000.000				
06	Kemaritiman	Pelayaran Kapal Penangkap Ikan	Nautika Kapal Penangkap Ikan	6.000.000.000	
			Teknika Kapal Penangkap Ikan	5.000.000.000	
		Pelayaran Kapal Niaga	Nautika Kapal Niaga	6.000.000.000	
			Teknika Kapal Niaga	5.000.000.000	
		Perikanan	Agribisnis Perikanan Air Tawar	2.900.000.000	
			Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	2.700.000.000	
			Agribisnis Ikan Hias	2.600.000.000	
			Agribisnis Rumput Laut	3.000.000.000	
			Industri Perikanan Laut	3.500.000.000	
		Pengolahan Hasil Perikanan	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	1.200.000.000	
07	Bisnis dan Manajemen	Bisnis dan Pemasaran	Bisnis Daring dan Pemasaran	1.800.000.000	
			Retail	900.000.000	
		Manajemen Perkantoran	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	600.000.000	
			Akuntansi dan Keuangan	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	600.000.000
		Logistik	Perbankan dan Keuangan Mikro	600.000.000	
			Perbankan Syariah	600.000.000	
			Manajemen Logistik	900.000.000	
08	Pariwisata	Perhotelan dan Jasa Pariwisata	Usaha Perjalanan Wisata	800.000.000	
			Perhotelan	1.600.000.000	
			Wisata Bahari dan Ekowisata	300.000.000	
			Hotel dan Restoran	1.300.000.000	
		Kuliner	Jasa Boga	600.000.000	
		Tata Kecantikan	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	1.500.000.000	
			Spa dan Beauty Therapy	900.000.000	
		Tata Busana	Tata Busana	5.000.000.000	
			Desain Fesyen	2.300.000.000	
		09	Seni dan Industri Kreatif	Seni Rupa	Seni Lukis
Seni Patung	700.000.000				
Desain Komunikasi Visual	4.700.000.000				

NO	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	BIAYA PERALATAN PRAKTEK UTAMA PER RUANG PRAKTEK
			Desain Interior dan Teknik Furnitur	5.500.000.000
			Animasi	1.600.000.000
		Desain dan Produk Kreatif Kriya	Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	5.500.000.000
			Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi	3.300.000.000
			Kriya Kreatif Keramik	2.000.000.000
			Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	3.200.000.000
			Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	6.500.000.000
		Seni Musik	Seni Musik Klasik	500.000.000
			Seni Musik Populer	1.400.000.000
		Seni Tari	Seni Tari	500.000.000
			Penataan Tari	500.000.000
		Seni Karawitan	Seni Karawitan	400.000.000
			Penataan Karawitan	400.000.000
		Seni Pedalangan	Seni Pedalangan	500.000.000
		Seni Teater	Pemeranan	300.000.000
			Tata Artistik Teater	600.000.000
		Seni Broadcasting dan Film	Produksi dan Siaran Program Radio	1.600.000.000
			Produksi dan Siaran Program Televisi	1.500.000.000
			Produksi Film dan Program Televisi	1.300.000.000
			Produksi Film	2.200.000.000